

LAPORAN
PENELITIAN MAHASISWA



Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramatjati

Oleh;

Chentika Septiana Putri (Ketua/NIM. 1902015078)

Yanto (Dosen Pembimbing/NIDN. 0325087502)

Herwin Kurniawan (Anggota/NIDN. 0326036802)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JAKARTA
2024

LEMBAR PENGESAHAN
Riset Sosial

Judul Penelitian

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramatjati.

Ketua Peneliti : Chentika Septiana Putri
NIM : 1902015078
Fakultas /Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : Yanto
NIDN : 0325087502
Anggota Peneliti : Herwin Kurniawan
NIDN : 0326036802
Waktu Penelitian : 3 Bulan

Luaran Penelitian

Luaran Wajib : Artikel Status minimal : Publish

Jakarta, 30 April 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Meita Larasati., S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0309059102

Ketua Peneliti



Chentika Septiana Putri
NIM. 1902015078

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Zulpahmi, M.Si
NIDN.0308097403

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Dr. apt. Supandi., M.Si
NIDN. 0319067801

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN.....	4
BAB I.....	5
Latar Belakang	5
Urgensi Penelitian	6
BAB II.....	7
Tinjauan Pustaka	7
Gambar Roadmap Penelitian.....	9
BAB III	10
Metode Penelitian.....	10
Diagram Alir Penelitian	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), (Studi Empiris orang pribadi yang ber NPWP di KPP Pratama Jakarta Kramatjati.) Variabel yang diteliti yaitu Modernisasi sistem administrasi perpajakan , sanksi perpajakan , dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu orang pribadi yang ber NPWP sebanyak 100 orang pribadi. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikan $t = 0,045 < 0,05$, Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikan $t = 0,0136 < 0,05$, Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikan $t = 0,000 < 0,05$. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai signifikan $t = 0,000 < 0,005$. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya untuk lebih mengembangkan indikator secara mendalam agar terkaji dalam lagi penelitian yang terkait dan memilih sampel atau populasi yang lebih luas jika topik yang sama agar data lebih baik.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan , kepatuhan wajib pajak prang pribadi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada pungutan sebagai sumber pendapatan negara. Tapi memang, berapa banyak pajak yang diterima Indonesia setiap tahun tidak mencapai potensi maksimalnya karena masih kurangnya kewajiban dari warga negara dalam memenuhi komitmen mereka untuk membayar pajak (merdeka.com)

UU No. menyebutkan bahwa 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Strategi Tugas, yang terakhir diubah dengan UU No. "Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan di kantor Departemen Jenderal Pajak yang bidang usahanya meliputi tempat tinggal atau kantor pusat Wajib Pajak dan dilengkapi dengan dokumen identitas perpajakan Nomor ," bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021.

Dalam ranah ketetapan pajak, masih terdapat keganjilan kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan konsistensi warga negara terhadap komitmen kewajibannya. Salah satu contoh fenomena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya terjadi di kawasan pekerjaan KPP Pratama Jakarta Kramatjati yang mencakup kecamatan Kramatjati. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada pada kecamatan Kramatjati yang tergolong wilayah padat penduduk, Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kegiatan ekonomi tinggi di kecamatan ini. Bagaimanapun, meskipun pergerakan moneter di sana tinggi, kondisi konsistensi warga di kecamatan Kramatjati justru menunjukkan kemerosotan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dari tahun 2015 hingga 2019, di mana konsistensi individu warga semakin berkurang.

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah lapor SPT	Kepatuhan WPOP
2018	58.318	51.735	89%
2019	61.289	52.159	85%
2020	63.973	53.789	84%

2021	66.127	55.849	84%
2022	68.918	54.656	79%

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan teknik ekspresif kuantitatif, khususnya informasi dari penggambaran kekhasan dan kualitas yang akan diteliti dengan strategi faktual yang digunakan (Hartono, 2017: 195). Metode kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan hard data, data penelitian berupa angka-angka terukur dengan menggunakan statistika sebagai alat uji komputasi, terkait dengan masalah yang diteliti untuk membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2019; 13). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Tempat Penelitian dilaksanakan di wilayah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang terletak JL. Dewi Sartika No.189A RT.2/ RW.5, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630.

Subyek dalam penelitian ini adalah warga negara swasta yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Variabel eksplorasi adalah gambaran yang memiliki nilai ragam tertentu yang diterapkan oleh para ilmuwan untuk direnungkan, baik yang ditaksir secara subyektif maupun kuantitatif yang kemudian dibuat determinasinya (Hartono, 2017: 171; Sugiyono, 2018: 57). Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu:

a) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Modernisasi Kerangka Organisasi Tugas adalah program untuk mengubah kerangka organisasi pengeluaran yang mendorong peningkatan dan bantuan yang ideal kepada warga negara. Modernisasi Kerangka Organisasi Tugas dapat membangun kepercayaan dan konsistensi dengan

Warga Negara. Rahayu (2010: 110) menjelaskan bahwa untuk memahami modernisasi kerangka kerja organisasi diperlukan perubahan desain hirarki, perbaikan proses bisnis melalui inovasi data dan korespondensi, peningkatan sumber daya manusia pengurus dan pelaksanaan administrasi yang baik.

b) Sanksi Perpajakan (X2)

Otorisasi Biaya adalah beban persetujuan bagi warga negara yang tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman biaya material. Seperti yang ditunjukkan oleh Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi bea adalah jaminan bahwa pengaturan peraturan dan pedoman biaya (charge standards) akan dipatuhi. Atau lagi pula, sanksi pungutan adalah instrumen preventif agar warga tidak mengabaikan standar pungutan.

c) Pengetahuan Perpajakan (X3)

Konsistensi masyarakat yang rendah dapat diakibatkan oleh rendahnya penilaian informasi dalam mengungkap dan memanfaatkan dakwaan. Informasi penilaian yang tinggi akan mempengaruhi warga untuk memenuhi komitmen kewajibannya, karena warga dapat melihat secara tepat dan akurat mengenai komitmen beban, penyelesaian SPT dan batas waktu penyampaian SPT, sanksi beban, biaya pekerjaan, dan kerangka biaya. Jika Warga Negara memiliki informasi tugas yang sah, informasi penilaian dapat memengaruhi kepatuhan Warga Negara dalam memenuhi komitmen pengeluaran

Variabel Dependen (Y)

a) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konsistensi warga. Safri Nurmantu (dalam Rahayu, 2010: 138), memaknai bahwa konsistensi warga harus terlihat dari keadaan warga yang berbakti dan berbakti dalam memenuhi segala komitmen pengeluarannya. Mengingat Pedoman Imam Uang Nomor:

74/PMK.03/2012, bahwa model-model konsistensi warga negara antara lain:

- a) Dalam menyampaikan SPT, warga harus tepat waktu sesuai pedoman yang relevan.
- b) Warga negara tidak memiliki hutang yang belum dibayar untuk berbagai tugas, kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan untuk mengganti atau menunda pembayaran cicilan.
- c) Ikhtisar anggaran yang telah diperiksa oleh pemegang buku publik atau lembaga administrasi keuangan pemerintah dinilai kurang memadai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Warga negara tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang pemungutan pajak berdasarkan pilihan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data responden berdasarkan usia wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

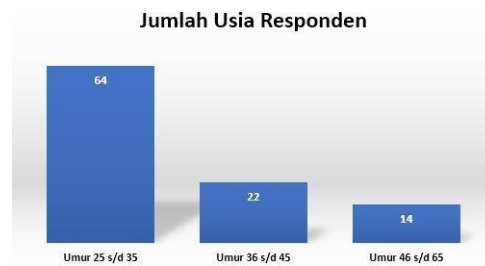
Usia Wajib Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
25 – 35 Tahun	64	64%
36 – 45 Tahun	22	22%
>45 Tahun	14	14%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Eksplorasi menunjukkan hasil bahwa warga tunggal yang setuju dalam mengumumkan pungutan adalah 64 responden atau 64% berumur 25 sampai 35 tahun, 22 responden atau 21% berumur 36 sampai 45 tahun, 14 responden atau 14% berumur lebih dari 45 tahun

Grafik 4.2.1 Histogram Demografi Responden berdasarkan Usia wajib pajak orang

pribadi



Sumber : Data primer yang diolah (2023)

4.2.1 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan WPOP Deskripsi data responden berdasarkan

Jenis Pekerjaan WPOP	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Swasta	46	46%
Pegawai Negeri	26	26%
Lainnya	28	28%
Total	100	100%

5

Pemeriksaan yang jelas adalah garis besar faktor- faktor yang digunakan dalam eksplorasi. Penggambaran yang dimaksud adalah sebagai informasi variabel yang ditangani, meliputi: rata- rata, terkecil, terbesar dan standar deviasi. Konsekuensi dari keterlibatan investigasi harus terlihat dari tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi	100	28	40	33.94	3.690
Sanksi Perpajakan	100	30	40	36.46	3.512
Pengetahuan Perpajakan	100	32	44	38.02	3.774
WPOP	100	30	40	34.95	3.202
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data SPSS yang diolah (2023)

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai tipikal (mean) tanggapan responden tentang Modernisasi kerangka organisasi tugas adalah 34,94 dengan standar deviasi $\pm 3,690$. Artinya, nilai tipikal (mean) pada modernisasi kerangka organisasi penilaian berada di antara jarak 31,25 ($34,94 - 3,690$) hingga 38,63 ($34,94 + 3,690$). Nilai tertinggi 40 dan nilai dasar 28 adalah jawaban responden yang paling ekstrim dan paling tidak terbalik.

2. Sanksi Perpajakan

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai tipikal (mean) solusi responden untuk membebaskan sanksi adalah 36,46 dengan standar deviasi $\pm 3,512$. Artinya, nilai tipikal (mean) sanksi tugas berada di antara cakupan 32,94 ($36,46 - 3,512$) hingga 39,97 ($36,46 + 3,512$). Nilai paling ekstrim 40 dan nilai dasar 30 adalah jawaban responden yang paling besar dan paling kecil nilainya.

3. Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai normal (mean) jawaban informasi pemungutan pajak adalah 38,02 dengan standar deviasi $\pm 3,774$. Artinya, nilai tipikal (rata-rata) pada informasi muatan terletak di antara jarak 34,24 ($38,02 - 3,774$) hingga 41,79 ($38,02 + 3,774$). Nilai tertinggi 44 dan nilai dasar 32 adalah jawaban responden yang paling tinggi dan paling kecil.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai normal (mean) jawaban terkait konsistensi individu warga negara adalah 34,95 dengan standar deviasi $\pm 3,202$. Artinya, nilai tipikal (mean) pada konsistensi individu warga berada di antara cakupan 31,74 ($34,95 - 3,202$) hingga 38,15 ($34,95 + 3,202$). Nilai

tertinggi 40 dan nilai dasar 30 adalah jawaban responden yang paling ekstrim dan paling tidak terbalik.

4.3 Hasil Pengujian Instrumen

Untuk mengetahui apakah penelitian yang valid dan reliabel digunakan, uji validitas dan reliabilitas harus dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menguji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan menggunakan program SPSS.

4.4 Uji Validitas data

Setelah menguji keabsahan, ahli menggunakan strategi koneksi Pearson, menghitung koefisien hubungan antara setiap nilai dalam setiap item penjelasan dan nilai keseluruhan dari item pernyataan. Patokan dalam mengarahkan uji legitimasi adalah jika r hitung \geq dari r tabel, pernyataan dianggap penting dan dapat digunakan dalam eksplorasi, demikian sebaliknya jika r hitung $<$ dari r tabel, komponen kalimat salah dan tidak dapat digunakan dalam penelitian.

4.5 Uji F (Simultan)

Uji F terukur digunakan untuk menguji apakah setiap faktor bebas atau faktor bebas yang diingat untuk model saling mempengaruhi variabel dependen. Konsekuensi dari uji F harus terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	354.195	3	118.065	17.159	.000 ^b
	Residual	660.555	96	6.881		
	Total	1014.750	99			

a. Dependent Variable: WPOP

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, Sanksi Perpajakan

Sumber : Data SPSS yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terlihat bahwa setiap faktor bebas dalam tinjauan, khususnya modernisasi kerangka organisasi biaya, kewenangan

biaya dan informasi beban mempengaruhi variabel dependen, khususnya konsistensi warga negara individu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemungkinan $\text{esteem} < \text{level kritis } (\alpha)$, yaitu $0,0 < 0,05$. Apalagi cenderung dilihat dari nilai F yang ditentukan dengan F tabel, diketahui bahwa nilai F tabel = $(k; n - k) = (2; 100 - 2) = (2; 98)$, jadi t tabel senilai 2,70 didapat. Dari tabel tersebut sangat mungkin beralasan bahwa F hitung > F tabel, yaitu setara dengan $17,159 > 2,70$

4.6 Uji t (Parsial)

Uji t terukur digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh dampak dari satu faktor bebas secara terpisah masuk akal dari berbagai faktor otonom. Efek samping dari uji t harus terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa setiap faktor bebas dalam kajian tersebut, khususnya modernisasi kerangka organisasi penilai, persetujuan pungutan, dan informasi pungutan pajak secara bermakna mempengaruhi variabel dependen, yaitu konsistensi individu warga negara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan critical degree of likelihood esteem yaitu ekuivalen dengan $0,045 < 0,05$ untuk variabel Modernization of the Assessment Organization Framework berpengaruh pada variabel singular citizen konsistensi, dikenakan sanksi $0,138 < 0,05$ bermakna berpengaruh pada variabel singular citizen konsistensi, untuk variabel informasi pemungutan pajak $0,00 < 0,05$ mempengaruhi variabel konsistensi warga tunggal. Apalagi dilihat dari nilai t yang ditentukan dengan t tabel, diketahui bahwa nilai t tabel dengan df (tingkat peluang) adalah $(\alpha, n - k) = (5\%, 100 - 2) = (0.05, 98)$, sehingga nilai t tabel adalah 1.984. Dari tabel tersebut sangat mungkin beralasan bahwa t hitung > t tabel, yaitu setara dengan $2,033 > 1,984$ untuk variabel Modernization of the Expense Organization Framework pada variabel Singular Citizen Consistence, $2,504 > 1,984$ untuk variabel Assessment Approvals pada Singular Variabel konsistensi warga dan $5,075 > 1,984$ untuk variabel

Informasi Tugas pada Konsistensi Warga Individu

SIMPULAN

Dalam melakukan pengujian ini untuk menguji Modernisasi kerangka organisasi penilaian, muatan kewenangan dan muatan informasi atas konsistensi individu warga negara yang memiliki NPWP di KPP Pratama Kramatjati. Hasil berikut dari pengujian dan pemeriksaan informasi yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dapat diselesaikan:

1. Modernisasi kerangka organisasi tugas harus terlihat dari t hitung $>$ t tabel sebesar $2,033 > 1,984$ sehingga sangat mungkin beralasan bahwa modernisasi kerangka organisasi pengeluaran secara bermakna mempengaruhi konsistensi individu warga negara.
2. Otorisasi pembebanan harus terlihat dari nilai t hitung $>$ t tabel sebesar $2,504 > 1,984$ sehingga sangat mungkin beralasan bahwa sanksi penilaian mempengaruhi konsistensi individu warga negara.
3. Informasi pemungutan pajak seharusnya dapat dilihat dari t hitung $>$ t tabel sebesar $5,075 > 1,984$ sehingga sangat mungkin beralasan sanksi pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi individu warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–19.

Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211(September), 163–169.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>

Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168.

<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>

- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–22.
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 116–135. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nurus S.A, Enong M., Dewi Pudji R. (2018) PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN LEVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2018 <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15852>
- Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J., & Najjuma, M. S. (2019). Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 14–31. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0007>
- Mustapha, B., & Obid, S. N. B. S. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 2–9. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.328>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995– 1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>

Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(16), 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>